

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Permasalahan lingkungan menjadi topik yang sering dibicarakan di era ini. Hal tersebut dikarenakan dampak kerusakan lingkungan sudah tampak, dan dapat dirasakan efeknya secara luas. Salah satu faktor penyebab kerusakan iklim, bersumber dari sikap dan perilaku manusia. Masalah muncul dari adanya gaya hidup konsumtif, namun tidak diimbangi dengan literasi pengelolaan sampah. Di Indonesia permasalahan sampah yang tidak terkelola mencapai 32,75 % dalam per tahun (SIPSN, 2021). Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju peningkatan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yaitu dengan mengelola serta mendaur ulang sampah sebelum dibuang ke TPA. Tempat Pengelolaan Sampah dengan model *reduce, reuse* dan *recycle* (TPS3R), menjadi salah satu alternatif penanganan sampah di tingkat komunitas. Konsep 3R dapat disebarluaskan dan diadopsi oleh masing-masing rumah tangga. Akan lebih baik jika dapat dikembangkan secara luas di tingkat komunitas, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi atau nasional. Model 3R menjadi wujud dari penerapan pola hidup minim sampah (Sukadaryati, 2021, p. 419). Operasionalisasi TPS3R melibatkan aspek sosial setempat, khususnya Desa Tanjungwangi. Pelibatan aspek sosial masyarakat termasuk dalam kategori pemberdayaan komunitas.

Di lansir dari Antaranews, (Maryati, 2022), menginfokan terdapat 24 ribu ton sampah dihasilkan setiap hari, oleh karena itu pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya menangani masalah sampah adalah dengan mengajak warga mengelola sampah melalui bank sampah. Bahkan, Gubernur Jawa Barat Ridwal Kamil mengungkapkan pentingnya pengelolaan sampah terpadu mulai dari hulu sampai hilir (Maryati, 2022). Selain itu, Pemerintah juga berkolaborasi dengan Waste4Change dan Sungai Watch untuk mengatasi permasalahan sampah di 100 titik sungai di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang (Meirina, 2022). Berbagai upaya penanganan sampah menjadi perhatian semua pihak, karena

hal tersebut dibutuhkan peran serta kerja sama dari berbagai pihak dalam menangani permasalahan sampah.

Dalam berita Regional Kompas menyebutkan bahwa Kabupaten Subang memiliki permasalahan sampah yang diakibatkan oleh adanya pemindahan penampungan sampah akhir dari TPA Panembong ke TPA Jalupang (Farhan & Aditya, 2021). Pada dasarnya pemindahan TPA ke tempat yang baru tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan sampah. Pemindahan TPA hanya bersifat sementara, sedangkan yang saat ini dibutuhkan adalah adanya wadah untuk mengelola sampah yang bersifat jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Subang mengharapkan kontribusi dari pihak swasta untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan sampah di Subang. Masalah lain berorientasi pada ketersediaan lahan, menimbulkan protes bagi warga setempat. Dikarenakan pencemaran lingkungan seperti udara, tanah dan air yang dapat mengganggu kenyamanan warga di sekitar area TPA. Masalah itu juga muncul saat pembangunan TPS3R. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dan komunikasi pada masyarakat, melalui penyediaan ruang diskusi dan musyawarah. Hal ini bertujuan membangun pemahaman bersama, sehingga tujuan dari pembangunan dapat tersampaikan dan diterima oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH), jumlah TPS di Kabupaten Subang sebanyak 60 TPS, sedangkan jumlah unit pengangkutan sampah hanya sebanyak 29 dari 46 unit yang bisa beroperasi (Farhan & Aditya, 2021). Keterbatasan fasilitas menjadi salah faktor penghambat dalam sistem pengelolaan sampah. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antarpihak dalam mengupayakan solusi lingkungan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah.

Pembangunan TPS juga dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat, hal ini dikarenakan kegiatan operasional masih dilihat sebagai sesuatu yang ‘asing’ bagi masyarakat setempat (Fia Rahmawati et al., 2021, p.6). Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk menyampaikan informasi, melalui sosialisasi manajemen sampah dan TPS3R. Harapannya dengan sosialisasi tersebut bisa memberikan gambaran pada masyarakat, sehingga mereka bisa memahami fungsi TPS3R. Selain sosialisasi, diperlukan juga pemberian pelatihan dan pendampingan. Ketiga proses tersebut termasuk ke dalam kegiatan pemberdayaan di tingkat komunitas. Upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah pada tingkat rumah tangga, telah dilakukan YGSI melalui staf atau fasilitator lapangan. Fasilitator lapangan bertugas mengordinir segala kegiatan program lingkungan di Subang, termasuk TPS3R Tanjungwangi. YGSI telah menjalankan perannya lewat pengadaan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan selama pelaksanaan pembangunan TPS3R Tanjungwangi. Sedangkan kunci keberhasilan pengelolaan sampah, terletak pada kesadaran kolektif masyarakat Desa Tanjungwangi. Dalam konteks YGSI, pembangunan TPS3R Tanjungwangi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, namun dilengkapi dengan kegiatan pemberdayaan, yang menjadi landasan serta gagasan yang menginisiasi terlaksananya pembangunan.

Alasan peneliti melakukan penelitian pada program TPS3R, karena terdiri dari dua alasan, yaitu alasan praktis dan akademis. Alasan praktis peneliti adalah karena pernah melakukan *internship* di YGSI dalam program TPS3R di Desa Tanjungwangi, Subang, Jawa Barat. Dengan pemahaman awal, data dan relasi telah peneliti miliki guna memudahkan proses penelitian ini. Selain itu, pada waktu *internship* selama 40 hari, peneliti sudah memiliki ketertarikan pada program yang dikembangkan oleh YGSI melalui Desa Percontohan Saemaul. Salah satu program yang dikembangkan adalah program TPS3R Tanjungwangi. Secara umum program TPS3R Tanjungwangi sama seperti program TPS3R lain, baik dari segi sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana difasilitasi oleh YGSI. Namun, peneliti juga memfokuskan kajian pada aspek pemberdayaan masyarakat, dengan berbekal pada pengetahuan semasa *internship*, dan observasi tambahan setelah penelitian. Sedangkan alasan akademis beranjak dari tinjauan literatur pada topik ini yang menunjukkan bahwa belum banyak literatur yang mengkaji tentang peran YGSI dalam pembangunan TPS3R. Akan tetapi, kajian tentang TPS3R cukup banyak ditemukan. Pembangunan TPS3R, jika dilihat dari segi sosial, merupakan wujud mendorong kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Di samping itu, melalui pengelolaan sampah di TPS3R dapat mengurangi laju penumpukan sampah di TPA. Selain itu, TPS3R ditujukan sebagai tempat memilah dan mengolah kembali sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. TPS3R dilihat sebagai suatu alternatif dalam mengatasi permasalahan timbunan sampah yang sering kali

terjadi di perkotaan. Secara sederhana, TPS3R menjadi ‘alat’ untuk mengelola sampah dalam suatu kawasan. Hal ini membawa implikasi pada terciptanya kawasan pemukiman bebas sampah. Penciptaan kawasan bebas sampah dapat terwujud karena keterlibatan antar pihak, baik masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, LSM, komunitas dan kelompok-kelompok lainnya. Oleh karena itu, peneliti melihat peran antar berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah, yang tentunya berimplikasi pada keberlanjutan TPS3R Tanjungwangi. Peneliti melihat peran YGSI dalam pembangunan TPS3R, cukup signifikan dengan permasalahan terakiat penanganan sampah Tanjungwangi. Oleh karena itu, penelitian ini membahas peran YGSI dalam pembangunan TPS3R Tanjungwangi.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa YGSI berperan dalam pembangunan TPS 3R Tanjungwangi?
2. Apa saja peran YGSI dalam pembangunan TPS 3R di Desa Tanjungwangi?
3. Bagaimana YGSI melakukan peran-peran dalam pembangunan TPS3R Tanjungwangi?

C. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peranan (*role*) diartikan sebagai aspek dinamis dari adanya kedudukan atau status (Soekanto, 1986, p. 220). Peran dan status merupakan satu kesatuan. Hal tersebut dapat dilihat melalui keberadaan status yang menyebabkan munculnya aneka peran. Dengan kata lain, adanya peran diakibatkan oleh keberadaan status sosial yang dimiliki oleh aktor tertentu, serta terdapat hubungan timbal balik antar keduanya. Selain itu, terdapat *role facilities* yang memungkinkan individu untuk menjalankan peran melalui aneka kegiatan (Soekanto, 1986, p. 221). Peran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan adanya status sosial tertentu. Peran mengacu pada keberadaan harapan yang menjadikan pelaksanaan peran memiliki tujuan. Dengan adanya status individu atau kelompok memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan peran sesuai dengan status yang dimilikinya. *Role facilities* dapat dilihat dari persediaan fasilitas, yang dalam studi ini berupa sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti *dump truck*, mesin pencacah sampah,

serta bangunan TPS3R. Peran sosial juga diartikan sebagai serangkaian harapan yang dimiliki seseorang karena menduduki posisi atau status sosial tertentu (Schaefer, 2012, p. 118). Selain mengambil pendapat dari Soekanto, peneliti juga menggunakan pendapat dari Biddle. Dalam *organization role theory*, peran memiliki fokus pada aktivitas yang telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan sistem sosial dan memiliki orientasi tugas yang bersifat hierarkis, sesuai dengan strata pada sistem sosial itu (Biddle, 1986, p. 73). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep peran dengan unsur-unsur yang diambil secara kombinitif baik dari pendapat Soekanto mau pun Biddle karena disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Peneliti tidak mengambil semua unsur yang sudah dipaparkan oleh ahli, melainkan mengambil beberapa unsur yang dianggap penting dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penelitian. Peneliti menggunakan beberapa unsur-unsur yang relevan dari konsep peran dalam penelitian ini, yaitu: status, harapan, tindakan, norma dan sikap.

a. Status

Teori peran menjelaskan adanya karakteristik perilaku sosial dengan fakta bahwa perilaku manusia dapat berubah bergantung pada identitas sosial serta situasi sehingga bersifat fleksibel. Adapun maksud dari karakteristik tersebut yaitu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan setempat. Posisi dan kedudukan memungkinkan YGSI bisa mengembangkan program TPS3R Tanjungwangi, yang tentunya hal tersebut berdasarkan atas pertimbangan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Atas berbagai pertimbangan, dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah bersama dengan masyarakat, kemudian menghasilkan suatu keputusan yang dilihat dapat menjawab problem persampahan di Tanjungwangi.

Terdapat juga penjelasan tentang teori peran organisasi, yang memahami peran sebagai pelaksanaan tugas dari organisasi yang bersifat hierarkis. Dalam *organization role theory*, peran memiliki fokus pada aktivitas yang telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan sistem sosial dan memiliki orientasi tugas yang bersifat hierarkis, sesuai dengan strata pada sistem sosial itu (Biddle, 1986, p.

73). Dalam konteks YGSI, sebagai organisasi, peran berada pada setiap posisi yang secara hierarkhis tampak pada struktur organisasinya.

b. Harapan

Biddle (1986, p. 69) menerangkan adanya harapan (*expectations are norms*), keyakinan (yang mengacu pada probabilitas subjektif, *subjective probability*) dan preferensi (yang terlihat pada sikap, *attitudes*) pada implementasi peran. Biddle memberikan pandangan tentang adanya harapan yang muncul pada setiap peran (*role expectations*) yang dipengaruhi oleh norma (*norms*), preferensi (*preferences*) dan keyakinan (*beliefs*) pada organisasi dan masyarakat setempat (Biddle, 1986, p. 75). Harapan dalam KBBI diartikan sebagai sesuatu yang diharapkan, yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk menjadi kenyataan. Dalam konteks pembangunan TPS3R Tanjungwangi, harapan tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana. Harapan melekat karena adanya tujuan serta target ketercapaian suatu program, termasuk dalam hal ini harapan dari YGSI setelah adanya TPS3R Tanjungwangi. YGSI berharap dengan adanya TPS3R Tanjungwangi, problem atas pengelolaan sampah dapat teratasi dengan optimal.

c. Tindakan

Dalam KBBI, tindakan dimaknai sebagai suatu perbuatan yang berlandaskan pada upaya mengatasi sesuatu. Dengan kata lain, tindakan merupakan sesuatu yang dilakukan berdasarkan pada upaya untuk mengatasi permasalahan yang dilihat sebagai prioritas, dan perlu segera ditindaklanjuti. Dalam penelitian ini, berfokus pada upaya dan perbuatan YGSI untuk menyukseskan program TPS3R melalui penyediaan sarana dan prasarana, serta melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara kontinu. Selain itu, juga melihat tindakan tegas YGSI untuk melaksanakan program pembangunan TPS3R.

d. Norma

Menurut Kolb (1964), dalam (Biddle, 1986, p. 76), norma berkaitan dengan standar nilai yang dipegang bersama oleh para anggota kelompok sosial terkait. Norma dalam KBBI dijelaskan sebagai suatu aturan atau ketentuan yang memiliki

sifat mengikat suatu kelompok, baik warga maupun masyarakat. Norma digunakan sebagai panduan untuk mengendalikan tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima (KBBI, 2022). Dalam kajian ini bertujuan mengetahui norma yang dipegang oleh YGSI, pengurus TPS3R, dan kelompok dalam masyarakat yang terlibat adalah pemegang norma tersebut. Norma tersebut mereka wujudkan pada rumusan kesepakatan yang dibuat bersama, yaitu oleh YGSI dan kelompok masyarakat setempat. Secara normatif, YGSI menghormati kebudayaan setempat serta melakukan pendekatan sesuai dengan nilai-nilai dan norma setempat agar dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat Tanjungwangi. Nilai adalah segala sesuatu yang dipandang bernilai, penting dan perlu diwujudkan melalui aneka tindakan dan kegiatan demi kebaikan bersama. Norma dilihat melalui keberadaan nilai-nilai yang menjadi kesepakatan bersama dalam pelaksanaan program TPS3R Tanjungwangi.

e. Sikap

Sedangkan, preferensi mengacu pada sikap (*attitudes*). Menurut KBBI, preferensi diartikan sebagai suatu “hak untuk” mendahulukan atau mengutamakan suatu yang menjadi prioritas. Pemilihan tentang apa yang akan diutamakan atau didahulukan biasanya didasarkan pada pertimbangan dan keyakinan pelaku. Dengan demikian, aspek keyakinan dapat dilihat melalui proses pemilihan aneka probabilitas subyektif yang salah satu opsinya dipilih menjadi prioritas. Oleh karena subyek penelitian ini adalah YGSI maka proses pemilihan itu akan mengikuti aneka perspektif dan pertimbangan YGSI pula, dengan mengetahui alasan memiliki preferensi untuk membangun TPS3R Tanjungwangi, bukan yang lain.

2. Pembangunan TPS3R Tanjungwangi

Pembangunan, menurut KBBI, diartikan sebagai suatu proses, cara, serta perbuatan membangun. Berdasarkan pengertian ini maka pembangunan TPS3R adalah suatu proses untuk membuat bangunan fisik dan non-fisik yang difungsikan sebagai tempat, aktivitas, koordinasi dan proses pengelolaan sampah dengan metode 3R, yaitu *reuse*, *recycle* dan *reduce*. Salah satu bentuk pengelolaan sampah yang umum ditemukan adalah pengolahan dari bahan organik, anorganik diubah

menjadi produk turunan. Pembangunan TPS3R merupakan proses membangun suatu bangunan fisik, komunitas pensuplai sampah, kelompok pengelola dan koordinasi kerja dalam mengumpulkan, memilah, mendaur-ulang sampah dan mengelola TPS3R secara keseluruhan. Hal ini senada dengan pandangan Direktorat Jenderal Cipta Karya, bahwa Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dengan model *reduce, reuse* dan *recycle* diselenggarakan dengan perlu dilakukan dengan menggunakan pola pendekatan kelola sampah dalam skala kawasan atau komunal (2017, p.1), yang dalam kajian ini akan dilakukan pada tingkat komunal. Menurut Direktorat Jenderal Cipta Karya (2017, p.1), pendekatan ini melibatkan peran aktif pemerintah (desa) bersama dengan komunitas setempat. Hal ini terutama karena pembangunan TPS3R merupakan bentuk pembangunan yang berbasis pada komunitas, yang bertujuan untuk memperbaiki situasi serta mendorong perubahan sosial (Ulum & Anggainsi, 2020, p.4). Selain itu, karena tujuan pembangunan adalah untuk memperkuat tatanan sosial masyarakat lokal (Ulum & Anggainsi, 2020, p.4), maka dengan pembangunan TPS3R ini maka tata-sosial setempat diperluas untuk melingkupi aktivitas TPS3R di desa ini. Menurut Eversole (2015), dalam Ulum & Anggainsi (2020, p.5), pembangunan sepatutnya memerhatikan dinamika sosial, lokal serta keterlibatan tindakan *bottom up* untuk membawa perubahan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, pembangunan TPS3R melibatkan pula pemberdayaan komunitas sebagai bagian dari satu kerangka utuh pengelolaan sampah. Pembangunan fisik saja tidak cukup, karena perlu dibarengi dengan upaya peningkatan SDM setempat, melalui proses pemberdayaan. Dengan demikian, pembangunan TPS3R dimaknai sebagai suatu proses membangun dua aspek sekaligus, yaitu aspek fisik maupun non fisik.

a. Pembangunan Fisik

Direktorat Jendral Cipta Kerja (2017), lebih lanjut menyampaikan bahwa infrastruktur TPS3R lebih menekankan pada penanganan sampah dengan cara mengurangi, memanfaatkan dan mengolah dari sumbernya, yaitu pada tingkat komunal: area pemukiman, area komersial, area pendidikan, dan lain-lain. Senada dengan paparan itu, TPS3R Tanjungwangi juga difungsikan sebagai tempat

pengolahan sampah pada tingkat komunal, yaitu komunitas warga Desa Tanjungwangi.

Pembangunan TPS3R merupakan salah satu bentuk sikap peduli lingkungan di mana tujuan pembangunan tersebut bersumber dari keresahan masyarakat akibat penumpukan sampah TPA yang semakin tidak terkelola dengan baik. Pembangunan erat kaitannya dengan permasalahan ketersediaan infrastruktur fisik yang menjadi kerangka kerja secara teknis. YGSI membangun TPS3R Tanjungwangi dalam bentuk bangunan fisik dan menyediakan sarana dan prasarana penunjang kerja seperti mesin pencacah, dump truck pengangkut sampah dll. TPS3R memiliki fungsi sebagai tempat pengolahan atau pengelolaan sampah sementara. Pengolahan sampah sementara sebelum sampah dibuang ke TPA, sampah dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sedangkan sampah yang tidak dapat diolah atau residu bisa langsung dibuang ke TPA.

b. Pembangunan Non-Fisik

Menurut Alexander (1976), dalam Nurman (2015, p.88), menjelaskan pembangunan merupakan suatu proses mencapai perubahan dalam lingkup sistem politik, sosial, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, pertahanan, teknologi, budaya dan kelembagaan. Begitu juga proses perubahan tersebut telah direncanakan sebagai upaya memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, pendapat itu dikemukakan oleh Portes (1976), dalam Nurman (2015, p.88). Pada dasarnya pembangunan bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan kesanggupan menggunakan kekuatan sendiri atau *self-reliance*, (Soedjatmoko, 1983, p.81). Senada dengan pendapat di atas, Bachtiar Efendi (2002), dalam (Edwar et al., 2020, p. 752), menjelaskan yang seimbang harus melibatkan pembangunan dari segi fisik dan non fisik. Pembangunan non fisik dikaitkan dengan penggunaan sumber daya manusianya. Berdasarkan pendapat beberapa tokoh di atas, peneliti mengerucutkan pembangunan sebagai proses yang direncanakan, yang mana itu diperlukan untuk menciptakan keseimbangan terutamanya untuk membentuk kekuatan serta kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan proses membangun kekuatan dan kesadaran kolektif sebagai bagian dari pembangunan yang bersifat non-fisik.

1) Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pengelolaan Sampah

Peran aktif masyarakat membutuhkan suatu proses penyadaran serta pemberian pemahaman. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada upaya menyadarkan serta memberikan peluang pada masyarakat meningkatkan keberdayaannya. Menurut Ife dan Tesoriero (2006, p.148) pemberdayaan melalui pendidikan memberi penekanan pada pentingnya proses edukatif. Proses edukatif dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat. Gagasan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dapat membantu memberikan pemahaman mengenai struktur operasi, penyampaian keterampilan dan kosakata baru untuk mencapai perubahan yang lebih efektif (Ife & Tesoriero, 2006, p. 148). Pemberdayaan bertujuan membangun masyarakat untuk mengetahui potensi yang dapat dikembangkan secara mandiri atau kelompok. Pemberdayaan di bidang lingkungan salah satunya melalui pelibatan masyarakat mengelola sampah, mulai di tingkat rumah tangga serta komunitas. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses peralihan situasi pasif menjadi aktif (Ulum & Anggainsi, 2020, p.8).

Dalam penelitian ini, kajian pembangunan TPS3R Tanjungwangi difokuskan pada serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh YGSI, termasuk proses pemberdayaan masyarakat di dalamnya. Dengan kata lain, fokus penelitian bukan pada bangunan fisik TPS3R semata, melainkan melihat aspek sosial masyarakatnya. Aspek sosial dilihat berdasarkan pelibatan masyarakat, dalam program, sebelum dan sesudah pembangunan TPS3R, termasuk izin, komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat. Di samping itu, melihat pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, serangkaian kerja yang dikembangkan oleh YGSI untuk mendukung keberhasilan program pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Dari segi lembaga, YGSI berkolaborasi dengan pemerintah daerah, baik kabupaten maupun tingkat desa. Pembangunan TPS3R melibatkan berbagai pihak baik Pemda Kabupaten Subang melalui DLH dan Dispemdes, beserta Pemerintah Desa Tanjungwangi dan jajarannya. Berdasarkan buku tahunan dan *newsletter* laporan berkala YGSI, peneliti menemukan bahwa telah dilaksanakan

kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta kunjungan lapangan terkait pengolahan dan daur ulang sampah.

2) Tahapan Pemberdayaan

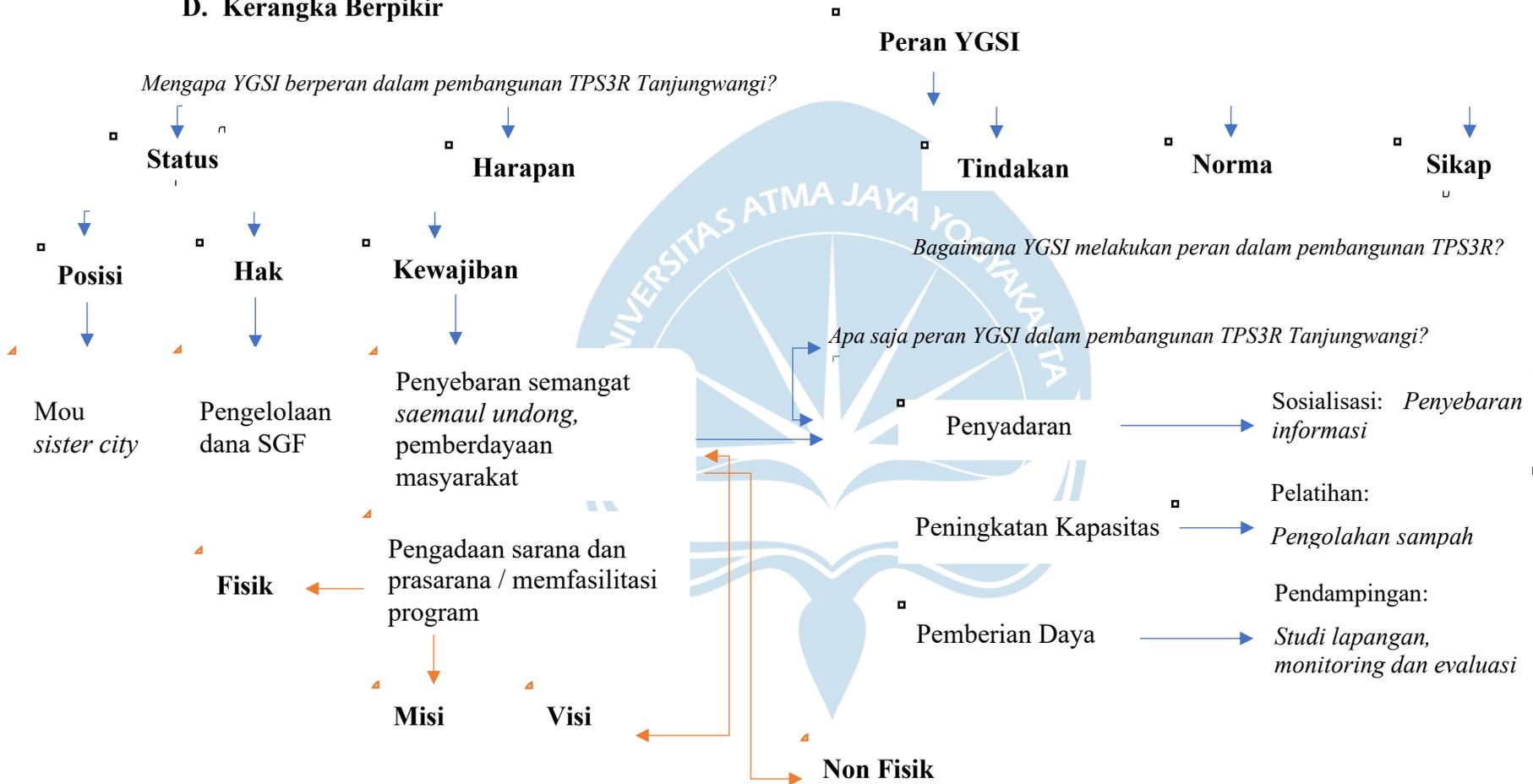
Wrihatnolo dan Dwijowijoto (2007), dalam Indrawati (2016), menjelaskan bahwa pemberdayaan terbagi atas 3 tahap yang terdiri dari: tahap penyadaran, tahap peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan tahap pemberian daya (*empowerment*) (Indrawati, 2016, p. 176). Pemberdayaan merupakan suatu upaya memberikan daya atau kekuatan pada suatu komunitas atau kelompok. Dengan tujuan komunitas dapat mengembangkan diri secara mandiri. Dalam pelaksanaan pemberdayaan berorientasi pada peningkatan rasa percaya diri atas kemampuan yang dimiliki. Pemberian dukungan menjadi bagian dari sumber kekuatan komunitas. Dari hasil observasi dan *newsletter* laporan berkala yang diterbitkan YGSI, peneliti melihat tiga tahapan ini tampak pada kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Dalam *newsletter* tersebut berisi pemaparan berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh YGSI tentang program lingkungan dalam rangkaian proses pembangunan TPS3R Tanjungwangi. Berikut beberapa aspek pemberdayaan, meliputi:

- 1) Tahap penyadaran; merupakan suatu upaya mengingatkan atau menyadarkan individu atau kelompok supaya dapat bergerak maupun bertindak dengan baik. Peningkatan kesadaran diartikan sebagai adanya pemberian kesadaran dalam berbagai struktur serta strategi perubahan yang bisa membuat orang-orang ikut berpartisipasi dan menetapkan tindakan efektif (Ife & Tesoriero, 2006, p. 349-350).
- 2) Tahap peningkatan kapasitas (*capacity building*) berkaitan dengan peningkatan kapasitas manusia, organisasi, sistem nilai (Indrawati, 2016, p. 176). Kegiatan yang termasuk dalam upaya peningkatan kapasitas adalah penyelenggaraan pelatihan. Peningkatan kapasitas dilihat berdasarkan proses *sharing* ilmu dan pengalaman dari para ahli kepada komunitas. Sehingga komunitas dapat berdaya dan percaya diri dengan memanfaatkan peluang usaha berlandaskan pada potensi daerah setempat.

- 3) Tahap pemberian daya; terdapat pemberian kekuasaan, otoritas dan peluang menurut Wrihatnolo dan Dwijowijoto dalam (Indrawati, 2016, p. 176). Setelah dua aspek di atas selesai dijalankan, maka tahap pemberian daya berfokus pada pengimplementasian program yang dikerjakan atau dijalankan langsung oleh masyarakat. Dengan pemberian kepercayaan serta dukungan pada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri komunitas. Sehingga mereka mau dan berkomitmen memaksimalkan upaya demi mencapai kesuksesan program.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka hal penting yang digunakan dalam menyusun kerangka berpikir terdiri dari konsep peran dan pembangunan TPS3R. Peran terdiri dari status, harapan, tindakan, norma dan sikap. Sedangkan untuk konsep pembangunan TPS3R, terdiri dari aspek fisik (sarana dan prasarana) dan non fisik (pemberdayaan). Pemberdayaan terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut: penyadaran (sosialisasi), peningkatan kapasitas (pelatihan), dan pemberian daya (pendampingan). Konsep tersebut peneliti susun menjadi kerangka berpikir yang tersaji dalam bagan sebagai berikut.

D. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1. Skema kerangka berpikir

Sumber: diolah oleh peneliti

E. Tujuan Penelitian

Pada studi ini penulis ingin mengetahui peran Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia (YGSI) dalam tiga hal yaitu:

1. Mengetahui alasan YGSI membangun TPS 3R Tanjungwangi.
2. Untuk mengetahui peran YGSI dalam pembangunan TPS 3R di Desa Tanjungwangi, Subang, Jawa Barat.
3. Mengetahui kegiatan yang telah dilakukan dalam pembangunan TPS3R Tanjungwangi oleh YGSI

F. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan mengikuti panduan prodi Sosiaologi tertuang dalam buku panduan penyusunan skripsi program studi Sosiologi. Adapun meliputi:

1. Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, kerangka konseptual, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II metodologi dan deskripsi subyek penelitian berisi jenis penelitian dan metode penelitian, informan, operasionalisasi konsep, metode pengumpulan data, jenis data dan cara analisis data serta deskripsi obyek atau subyek penelitian.
3. Bab III temuan dan pembahasan berisi uraian dan penjelasan hasil temuan sesuai dengan rumusan masalah.
4. Bab IV kesimpulan, pemaparan atas penarikan simpulan serta keterjawaban hasil penelitian.
5. Daftar pustaka hasil referensi yang digunakan untuk menyusun laporan akhir.